

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Inovasi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada manusia untuk melaksanakan pekerjaannya. Pada zaman Millennial seperti saat ini inovasi menjadi hal penting dan menjadi sebuah atau suatu terobosan yang diharapkan dapat mengubah perilaku individual maupun komunal dari sekelompok manusia yang bekerja untuk memperoleh tujuan hidup yang akan diraihinya. Dengan inovasi inilah manusia dapat melakukan perubahan dalam hidupnya dalam arti dengan kemampuan akal dan pikirnya, maka manusia dapat berbuat sesuatu untuk diri sendiri dan lingkungan sosialnya sehingga mudah dalam melaksanakan pekerjaan dan rutinitas yang dilakukannya sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia maka peran inovasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah diperlukan dan menjadi penting sehingga menentukan keberhasilan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya dalam beradaptasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dan kemungkinan timbul di masa yang akan datang. Hal inilah yang disebut dengan daya inovatif. Yang dimaksud dengan daya inovatif merupakan kemampuan untuk membawa perubahan ke arah yang baru sebagai cara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap masyarakat

Menurut Thahir (2019) inovasi bukan semata-mata respons atas paradigma pemerintahan dan administrasi namun juga suatu keharusan supaya eksistensinya semakin bermakna dalam konteks sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Kesadaran pentingnya berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu wilayah kini semakin tinggi, tetapi sebenarnya masih sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebaruan saat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada umumnya, rendahnya kemampuan berinovasi (*ability to innovate*) dan kemauan berinovasi (*willingnes to inovate*) menjadi tantangan bagi kalangan pejabat publik di instansi pemerintah daerah, sehingga hanya memberlakukan pelaksanaan pemerintahan sebagai rutinitas. Menurut Yikwa (2012) dengan semakin majunya teknologi seperti sekarang, seharusnya momen ini bisa dijadikan peluang bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar sehingga memberikan dampak positif dari segi efisiensi dan efektifitas terhadap pendapatan daerahnya.

Menurut Tri Utomo (2016) meskipun inovasi di Indonesia sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, *piecemeal* dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain, tidak terkoneksi dengan peta jalan (*road map*) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara itu, *piecemeal* (satu per satu) karena inovasi yang diterapkan kurang memberi efek besar dan kolektif. Akibatnya, inovasi berakhir stagnan. Oleh sebab itu, sebuah inovasi dalam organisasi pemerintah memerlukan daya kolaborasi dan elaborasi yang bersifat

enable atau dapat terlaksana dengan baik dan dapat bertahan di berbagai situasi dan kondisi.

Efektifitas merupakan upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan dan memaksimalkan pendapatan daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Soetopo, (2012) efektivitas adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini ketepatan pemerintah dalam memenuhi sasaran pendapatan retribusi pasar. Efektivitas penerimaan retribusi menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana yang ada didaerahnya. Adapun pernyataan yang dikutip dari Imamah & Irwantoro (2012) yang dimana retribusi pasar ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pedagang dalam melakukan usahanya, sehingga pedagang diwajibkan untuk memenuhi atau membayar atas fasilitas dan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga bisa dikatakan terciptanya kenyamanan dan rasa aman dari pedagang dalam pekerjaannya di pengaruhi dari adanya kesinambungan antara pemerintah dan pedagang melalui efektivitas pendapatan retribusi pasar.

Maka dari itu untuk meningkatkan efektifitas dalam kinerja pemerintah, perlu adanya dukungan inovasi teknologi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yakni dengan melakukan inovasi penarikan retribusi secara elektronik (E-Retribusi). E-Retribusi merupakan sistem pemungutan retribusi yang telah di hubungkan dengan teknologi komputer secara elektronik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramana & Adawiyah (2020), mengemukakan bahwa, program E-Retribusi pasar yang dilaksanakan pada pasar Patrang Kabupaten Jember memberikan hasil bagi pedagang dan staff pengelola pasar dalam mengatasi masalah seperti keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga perangkat pendukung teknologi. Sehingga dalam proses pemenuhan kewajiban retribusi pasar para pedagang pasar dan pihak staff pengelola pasar sangat terbantu. Pada penelitian lain dilaksanakan oleh Fajarwati Wijaya et al., (2020) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa program E-Retribusi pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta mampu menyederhanakan pelayanan publik. E-Retribusi menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kejelasan pembayaran. Namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa dikatakan sempurna. Ada pula penelitian dari Susanto et al., (2018) yang dimana mengatakan bahwa hadirnya program E-Retribusi ini dapat membantu proses pengelolaan dan pengawasan terhadap proses transaksi retribusi pasar dengan mudah dan cepat.

Dari ketiga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran program E-Retribusi pasar ini sangat diharapkan akan dapat membawa perubahan kepada proses pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar kearah yang lebih baik lagi. Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini telah menerapkan E-Retribusi Pasar untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Program E-Retribusi Pasar sudah dikembangkan dan diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sejak tahun 2018. Hal ini merupakan langkah inovatif untuk memberikan solusi kebutuhan akan sistem pemantauan mulai dari proses

pendaftaran, proses penetapan, proses penyetoran dan proses pelaporan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Bantul yang transparan dan akuntabel.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul membuat inovasi mengenai sistem pembayaran retribusi pasar yang sudah terintegrasi kedalam komputer (*Komputerisasi*), yakni dengan menghadirkan E-Retribusi Pasar. Hadirnya program ini adalah salah satu perwujudan dari *electronic government* yang diharapkan dan ditujukan demi mempercepat dan mempersingkat alur proses pemungutan retribusi pasar yang sebelumnya masih menggunakan metode konvensional. Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan sistem ini untuk menciptakan pemerintahan yang transparan sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi resiko yang ada seperti salah satunya yaitu kebocoran dana, dan membuat laporan keuangannya menjadi lebih akuntabel. Inovasi teknologi ini diharapkan mampu meminimalisir keterbatasan sumber daya manusia yang ada di lapangan sehingga pengelolaan retribusi pasar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih efektif dan efisien untuk mencapai target yang hendak dicapai.

Hasil observasi awal yang telah dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menemukan bahwa pelaksanaan program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2018. Dalam mendukung kebijakan pelaksanaan program E-Retribusi Pasar, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Pasar Imogiri dan Pasar Bantul sebagai *Pilot*

Project dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul. Berikut tabel dari target dan pendapatan retribusi yang telah dimuat dalam Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2019:

Tabel 1. 1 Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi
2017	2.125.000.000	2.391.198.169
2018	2.135.441.000	2.266.150.990
2019	2.824.000.000	3.262.478.210

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2018, program E-Retribusi pasar mulai diresmikan sehingga peningkatan dalam penerimaan pendapatan retribusi belum terasa hingga tahun 2019. Dimana mulai terjadi peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya yang menandakan system E-Retribusi ini memiliki potensi dalam membantu peningkatan pendapatan retribusi untuk menopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

Program E-Retribusi pasar ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ditujukan sebagai upaya untuk mencegah kebocoran retribusi pedagang. Selain itu, pendapatan yang dikelola dari penyewaan kios di pasar tradisional diharapkan lebih transparan dan akuntabel dengan lebih mengedepankan kepatuhan dan kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Tentunya tidak sedikit permasalahan yang dihadapi selama ini. Selain semakin berkurangnya petugas pemungut retribusi pasar dan lain dari itu juga adanya

anjaran dari pemerintah pusat bahwa lebih dipertimbangkan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diupayakan dengan melaksanakan kebijakan transaksi nontunai (*online*).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *e-government* pemerintahan Kabupaten Bantul dalam menerapkan E-Retribusi yang dimana pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang lebih efektif. Penerapan E-Retribusi di Kabupaten Bantul sejak diresmikan dua tahun lalu sejatinya sistem ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi terhadap penerapan E-Retribusi dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pasar. Selain itu, petugas pemungut retribusi pasar juga masih menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan manual yang belum sepenuhnya menerapkan teknologi komputer. Hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kerja yang memahami teknologi sehingga belum bisa mengadopsi perkembangan teknologi aplikasi E-Retribusi. Maka dari itu, permasalahan ini semakin mempersulit sistem ini bekerja dengan baik dan belum dapat mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diharapkan, yakni efisiensi dan efektivitas pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem berbasis aplikasi elektronik E-Retribusi Pasar.

Kebaharuan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu E-Retribusi dan objek penelitiannya ialah Dinas Perdagangan Bantul yang mana peneliti sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian mengenai perangkat E-Retribusi pada Dinas Perdagangan Bantul. Pada penelitian sebelumnya

dilakukan di Dinas Perdagangan Surakarta, Pasar Patrang, Pasar Sidoarjo dan lain lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penerapan aplikasi E-Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui keefektifan dari implementasi sistem ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAN IMPLEMENTASI E-RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana implementasi E-Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui implementasi E-Retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat penelitian ini meliputi manfaat teoritis atau akademik dan manfaat praktis, yakni:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah nuansa pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan orang lain terutama terkait literasi dan onefektivitas pelaksanaan program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul dalam upaya mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru yang sangat penting dan berkesan bagi peneliti.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik kepada Pemerintah Kabupaten Bantul guna diperoleh gambaran empiris tentang pelaksanaan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul. Sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan lebih efektif dan optimal dan mampu untuk mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.